



SUMBER BERITA

KAMIS, 11 OKTOBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Menelusuri Aset Bangunan Pemkot Terbangkalai

Bangun Miliaran Rupiah Kini Tinggal Nama

PREDIKAT opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak pernah diraih oleh Pemkot Bengkulu selama tujuh tahun terakhir. Hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Terlebih lagi masyarakat penuh harapan dengan kepemimpinan baru dari Helmi Dedy kali ini bisa meraih predikat WTP tersebut,

Dari penelusuran **RB**, aset yang paling parah nasibnya yakni Pasar Tanjung Gemilang Bentiring, Pasar Barukoto 1, Pasar Barukoto 2, Terminal Betungan Terminal Sungai Hitam, Tempat Pelelangan Ikan di Pondok Besi, dan Gedung Balai Adat. Bila ditaksir untuk dana pembangunan aset-aset gedung tersebut mengeluarkan biaya tidak sedikit, mencapai belasan miliaran rupiah.

Bahkan mirisnya lagi nasib aset gedung Balai Adat yang baru saja dilakukan peremajaan dengan biaya yang tak sedikit dikeluarkan menggunakan dana APBD kota tahun 2015 lalu, hingga sampai saat ini tak kunjung dimanfaatkan oleh Pemkot. Dan kondisinya pun terlihat makin *memprihantinkan*.

Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Kota Heri Ifzan, SE menyayangkan penataan aset Pemerintah Kota yang selalu bermasalah. Bahkan dia terus meminta agar Pemkot berbenah. "Dari kajian tim pansus aset DPRD kota memang faktanya banyak sejumlah aset yang tidak dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Kota. Salah satunya saja bangunan Balai Adat sampai sekarang kita lihat belum dimanfaatkan. Padahal sudah banyak uang yang dihabiskan untuk pemeliharaan gedung tersebut," terang Heri,

Menurut Heri, jika bangunan aset gedung tidak di-

manfaatkan tersebut dengan baik, akan timbul masalah dikemudian hari. Karena bangunan kosong tidak terurus itu akan disalahgunakan untuk tempat orang berkumpul mengarah ke praktek prostitusi atau perbuatan kriminal lainnya.

"Mirisnya lagi ada gedung beberapa kali direnovasi, namun tidak juga dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya aset gedung-gedung itu dirawat dan dikembangkan sesuai fungsinya. Inilah yang kita sangat sayangkan bahwa pembangunan terkesan mubazir," jelasnya.

Selain itu sambung Heri, Selama ini Pemkot hanya mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI tersebut karena masih kendala persoalan aset. "Bisa dilihat kalau pengelolaan aset daerah kita sekarang ini memang masih belum sempurna, makanya persoalan ini menjadi perhatian kita bersama untuk bersama membenahi. Agar kedepan pengelolaan tata aset pemkot lebih baik," tuturnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota lainnya Rena Anggraini mengungkapkan, sebaiknya aset Pemkot yang sangat penting dimanfaatkan demi kepentingan umum seperti kawasan pasar tradisional. "Contoh Pasar Barukoto 1 agar tidak terkesan mati suri, segeralah

pemkot untuk mengkonsep atau menata bangunannya dengan melakukan perhaban menyeluruh. Agar seluruh pasar dimanfaatkan dengan baik, tentu akan nampak geliat perekonomian di Kota ini. Sekarang lihat sendiri kondisinya terkesan mati suri," jelasnya. (**)